

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

KEBOLEHAN ORANG TUA MELEBIHKAN PEMBERIAN HIBAH

DIANTARA SEBAGIAN ANAK

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak.

Islam telah menyeru kepada umatnya agar saling tolong menolong diantara sesama dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Diantaranya dengan berderma atau berhibah, karena hibah merupakan salah satu kebaikan diantara berbagai kebaikan yang disyari'atkan oleh Islam.¹

Hibah yang lebih utama adalah kepada kerabat, sebab dapat mempererat hubungan tali silaturrahmi.² Hubungan silaturrahmi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, jika hanya didasarkan kepentingan individu dan kasih sayang semata tanpa dilandasi sebuah prinsip keadilan.

“Mayoritas ulama’ sepakat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang melebihi pemberian hibah terhadap sebagian anaknya atau penghibahan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa mengikutsertakan yang lain.”³

¹ As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, Beirut, Lubnan: Dar Fikr, tt, hlm. 396

² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm.

³ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 328

Abu Ishaq, As-Tsauri, Thowus, dan sebagian ulama' Malikiyyah mewajibkan persamaan '*athiyyah* maupun hibah. Ahlu Dhahir juga berpendapat bahwa, melebihkan hibah atas sebagian anak, tidak boleh. Terlebih jika memberikan hibah seluruh harta kepada sebagian anak.⁴ Alasan yang digunakan oleh ulama' yang melarang *tafdhil* (melebihkan) pemberian hibah diantara sebagian anak, dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka.

Maka dari itu tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Mubarak berpendapat bahwa: "Anak perempuan diberi bagian seperti yang diberikan kepada anak laki-laki."⁵ Karena hibah merupakan pemberian ketika masih hidup, maka sebaiknya dibagi sama rata sebagaimana pemberian nafkah dan kishwah.⁶

Bahkan ada diantara para ulama' yang memahami perintah tersebut menunjukan wajib. Karena pada hakikatnya persamaan pemberian itu hukumnya wajib, sedangkan melebihkan itu hukumnya haram.⁷ Akan tetapi, teks hadits tersebut masih bersifat umum, sehingga masih banyak para ulama' yang memperselisihkan dari segi kesahihan atau makna yang terkandung di dalamnya.

Salah satunya Ibnu Qudamah pengarang kitab *Al-Mughni* dari Ulama' Hanabilah dalam kitabnya ia telah menyatakan:

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab III mengenai pendapat Ibnu Qudamah menunjukan bahwa perbuatan *tafdhil* (melebihkan). Dalam hal ini

⁴ *Ibid.*,

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz, 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt, hlm. 267

⁶ *Ibid.*

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Beirut, Lubnan: Dar al Fikr, tt, hlm. 396

melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak adalah diperbolehkan, jika ada indikasi-indikasi tertentu seperti: kebutuhan yang mendesak, kesibukkan dalam mencari ilmu, keluarga banyak, cacat fisik, menghindarkan dari perbuatan negatif yang dilakukan oleh sebagian anak. Dia lebih menekankan pada aspek kepentingan sosial masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan.

Alasan kenapa Ibnu Qudamah membolehkan hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

1. Kebutuhan, di mana setiap anak pastinya berbeda. Suatu misal anak yang kecil dengan anak yang besar atau antara anak yang sudah mapan dan yang belum mapan, pasti memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda pula.
2. Pendidikan, dalam hal kependidikan mulai dari tingkatan anak satu dengan yang lain belum tentu sama sehingga biaya pendidikan yang dikeluarkan pastinya juga berbeda, waktu yang ditempuh apakah lama atau sebentar.
3. Keluarga, ketika sudah berumah tangga dan memiliki tanggung jawab yaitu menafkahi Isteri dan anak-anak. Apalagi ketika memiliki anak yang cukup banyak, pastinya membutuhkan biaya yang cukup banyak pula.
4. Kesehatan, misal salah seorang anak mengidap sebuah penyakit dan memerlukan biaya perawatan yang cukup besar, apakah hal ini etis dengan menyamakan yang lain. Dan berusaha menuntut agar disamakan padahal dalam keadaan susah mendapatkan musibah.
5. Menghindarkan dari perbuatan negatif yang dilakukan sebagian anak, dalam hal ini alangkah lebih baik jika diberikan kepada anak yang bisa *men-tasharuf*-kan dengan baik dan tidak menjadi mubadzir harta tersebut.

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa pemberian terhadap anak tidak harus sama rata, akan tetapi diperbolehkan melebihkan diantara sebagian anak dengan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan diantaranya kebutuhan dan keterpaksaan.

Maka menurut penulis dalam menganalisis permasalahan tentang diperbolehkan melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak adalah kebolehan dengan pertimbangan melihat sebuah kondisi atau keadaan realita yang ada, bahwa kebutuhan setiap anak berbeda yang mengakibatkan berbeda pula dalam pemberian hibah tersebut.

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil, sudah jelas berbeda dengan anak yang sudah dewasa atau berdiri sendiri ataupun sudah mapan kehidupannya. Kemudian hadits tentang perintah kesamaan terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak tersebut perlu ditinjau kembali, khususnya dalam mengimplimentasikan terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Artinya, kritik redaksi perlu dilakukan dengan standar rasional pada saat ini. Sebagai contoh apakah kesamaan dalam memberikan pemberian hibah terhadap anak akan tetap dilaksanakan yang sangat jauh dari logika ataupun realita masyarakat pada umumnya.

Adapun jika menyamakan bertujuan agar tercipta suatu keadilan, hal ini perlu dicermati lagi, karena adil memiliki beberapa pengertian, dalam konteks apakah keadilan yang dimaksud.

Apabila adil yang dimaksud adalah dalam hal sikap dan perlakuan, tanpa membedakan satu sama lain, maka ini yang dimaksud dengan adil dalam

pengertian "sama" dan perlu digaris bawahi persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.⁸ jika hal ini tidak dilaksanakan, maka dinamakan dengan kedzaliman.

Suatu misal sebagai seorang anak laki-laki maupun perempuan tidak boleh dibeda-bedakan. Dikarenakan mereka memiliki hak yang sama dalam hal sikap dan perlakuan.

Berbeda dengan keadilan dalam pengertian "seimbang" di mana keadilan di sini lebih identik dengan kesesuaian (keproporsionalan) dan tidak mengharuskan adanya persamaan mengenai kadar dan syarat bagi semua anak agar seimbang. Bisa saja anak yang satu mendapatkan porsi yang kecil dan yang lain lebih besar. Sedangkan besar kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkannya darinya. Suatu misal dalam masalah waris dan persaksian.⁹

Untuk mengatakan adil atau tidaknya sesuatu, perlu melihat dulu konteks yang ada. Bukan semata-mata memahami makna keadilan dengan kesamaan. Padahal ketika keadilan itu diartikan dengan kesamaan belum tentu keadilan yang dirasakan, akan tetapi ketidakadilan yang didapatkan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab III mengenai pendapat dan dasar hukum sebagai proses *istinbath* (penggalian) hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum yang terkait dengan masalah pemberian hibah yang dilebihkan diantara sebagian anak. Diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, hadits yang mengatakan bahwa; "pemberian diantara sebagian anak harus disamakan", karena hal tersebut bisa menimbulkan permusuhan dan putus tali

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. VII, hlm. 114

⁹ *Ibid.*,

silaturrahmi diantara mereka. Dan kedua, hadits yang mengatakan tentang “keadilan dalam pemberian terhadap anak-anak”.

Dalam hal ini perlu adanya pemahaman dan pengkajian yang lebih mendalam terhadap teks hadits masing-masing. Melihat dari teks hadits yang pertama tentang pemberian harus sama, menurut penulis sangat tidak sesuai dalam perkembangan dan realita di masyarakat, yang mana menuntut adanya prinsip keadilan dan saling tolong menolong (*ta'awun*) di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat pada umumnya. Maka ketika hadits yang mengandung makna berdasarkan prinsip kesamaan dalam pemberian tersebut tersebut diaplikasikan dalam sosial masyarakat. Bisa jadi bukan keadilan yang diperoleh melainkan sesuatu yang merugikan orang lain dan mengakibatkan kedzaliman, dikarenakan tingkat kebutuhan masing-masing anak tidak sama.

Sedangkan hadits yang kedua, mengenai keadilan terhadap anak-anak. Menunjukkan bahwa Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat adil dalam memperlakukan terhadap anak, baik dalam memberi kasih sayang maupun pemberian. Sebelum bicara lebih jauh mengenai pemberian hibah terhadap anak yang dilebihkan akan penulis paparkan beberapa makna dari adil itu sendiri.

Adil merupakan sikap mental yang mendasar dari kehidupannya batiniyyah manusia dalam menegakkan keharmonisan dan keteraturan kehidupan ini.¹⁰ Inilah arti eksistensi adil yang tidak boleh terlepas disaat bertindak dalam

¹⁰Amril, *Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghīb al-Isfahani*, LSKF2P (Lembaga Studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan, dan Perempuan), Cet. I, 2002, hlm. 125

konteks adil. Dalam pergaulan masyarakat, adil muncul karena adanya tanggung jawab dalam diri manusia.

Dengan demikian adil adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial (*social life*). Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia, jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun pihak yang lain memperoleh keuntungan. Tetapi keuntungan sepihak itu hanya berlaku sementara waktu. Jika sistem sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang. Bahkan ketika telah terjadi ketidakseimbangan, maka kerugian bisa menimpa semua orang yang melanggar keadilan.¹¹

Sifat adil bukan semata-mata bagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain.¹² Disini jelas bahwa kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak adalah bisa dikatakan sebagai suatu keadilan, dikarenakan ia mempertimbangkan kepentingan orang lain, dalam hal ini kebutuhan setiap anak satu sama lain berbeda.

Sedangkan kata adil yang menggunakan kata *qawwam* berarti “pendirian yang teguh” atau “berdiri tegak”. Dalam berdiri tegak orang tidak mudah terombang-ambing kekiri atau kekanan. Dan jika pun bergerak, ia bergerak dengan seimbang sehingga tidak jatuh. Disini terkandung unsur fleksibilitas yang menyebabkan seseorang tidak menyimpang. Inilah watak seorang pemimpin atau

¹¹ *Ibid*, hlm. 388

¹² *Ibid*, hlm. 374

seorang yang bertanggung jawab, seperti seorang kepala rumah tangga. Seorang laki-laki dalam rumah tangga adalah *qawwam* atau pemimpin. (Q.s al-Nisa'/4;34).

Dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, melainkan untuk memberikan pengertian bahwa laki-laki itu, dalam suatu rumah tangga harus bertanggung jawab. Jika mampu atau jika keadaan memaksa, maka seseorang perempuan bisa pula menjadi pemimpin dan untuk itu ia harus mampu bertindak adil.¹³ Ini menjadi salah satu indikasi kenapa laki-laki lebih diprioritaskan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Islam tidak serta merta memprioritaskan laki-laki selamanya seperti ini, bisa saja hal itu sebaliknya. Berdasarkan perubahan masa, tempat, keadaan dan kebiasaan. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ¹⁴

Artinya: “Perubahan hukum dikarenakan seiring berubahnya tempat, masa, kondisi, niat, dan kebiasaan”

Selain itu berlaku adil juga diperintahkan dalam memberikan kesaksian.

Seseorang yang benar-benar bertindak adil adalah yang tetap jujur, sekalipun hal itu menyangkut dirinya sendiri, Ibu, Bapak atau tidak berpihak kepada seseorang yang telah menyimpang dari kebenaran.¹⁵ Dalam hal ini mengenai perintah Nabi Saw untuk mendatangkan saksi juga merupakan salah satu dimensi keadilan. Karena tanpa kedatangan saksi tersebut, masalah pemberian hibah kepada Nu'man bisa dikatakan sebagai suatu ketidakadilan.

¹³ Dawan Rahardjo, *Loc. Cit.*

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh*, jilid I, Jakarta Timur, Prenada Media: hlm. 214

¹⁵ Dawan Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 375

Makna keadilan itu sendiri bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dan berintikan kebenaran (*al-haqq*). Keadilan berarti pula, tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dapat disebut pula ketidakadilan dan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Allah tidak akan mengizinkan manusia mendzalimi diri sendiri.¹⁶

Di dalam kitab “*Syarh al-Mumtī kitab al-Waqf wal hibah wal washiyyah*” karangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dijelaskan Sekiranya mempunyai dua orang saudara kandung, dan khawatir jika hanya memberi salah seorang dari mereka akan menjadi sebab terputusnya hubungan yang lainnya, maka ia tetap boleh memberi hanya kepada salah seorang dari mereka, tetapi secara sembunyi-sembunyi, agar saudara yang kedua tidak memutuskan hubungan kekeluargaannya. Yang wajib dia lakukan dalam hal ini bukanlah berlaku adil, namun dia harus menghindari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan putusnya tali silaturahmi. dan hal ini dapat diwujudkan dengan cara memberi secara sembunyi-sembunyi.¹⁷

Parameter sikap adil tersebut sesuai dengan kadar bagian waris mereka, adalah pendapat yang rajih. Dalilnya adalah pembagian yang telah Allah Swt tetapkan terhadap anak, yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian anak perempuan.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 389

¹⁷ Muhammad Bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, hlm. 126

¹⁸ *Ibid*.,

Sebagian ulama' berpendapat, berlaku adil adalah dengan memberi sama rata. Yakni, bagian anak perempuan seperti bagian anak laki-laki.¹⁹ Mereka berdalil dengan keumuman hadits Nu'man:

عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله ص م اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ²⁰

Artinya: “*Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian.*”

Sementara kata “*aulad*” berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan. juga, berdasarkan sabda Nabi Saw: “Bukankah engkau ingin agar mereka memberikan bakti yang sama kepadamu? Secara dhahir, redaksi ini menunjukan agar mereka diberi secara sama rata, agar mereka memberikan bakti yang sama.

Namun hadits tersebut tidak menunjukan hal tersebut. Alasannya, yang pertama, sabda Nabi Saw. “Berlaku adillah kepada anak-anak kalian.” Nabi Saw tidak mengatakan : “Berikanlah sama rata,” tetapi, “Berlaku adillah kalian.”

Bahwa bentuk keadilan-Nya adalah memberikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Kedua, dalam sebagian redaksi hadits di atas disebutkan: “Apakah engkau memiliki beberapa anak laki-laki? Dia menjawab: ‘Ya.’ Beliau bersabda: “Apakah engkau memberikan seperti itu kepada mereka? Dia menjawab: ‘Tidak’ Beliau bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian.” sabda Nabi Saw: Apakah engkau memiliki beberapa anak laki-laki?” menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi antara Nu'man dan saudara-saudaranya yang lain yang semuanya adalah anak laki-laki dan tidak ada saudara perempuan. Jika mereka semua adalah anak laki-laki, maka harus diberikan secara sama rata.

¹⁹ As-Syirbini, *Loc. Cit*

²⁰ Imam Muslim, *Loc, Cit.*

Ketiga: Sabda Nabi Saw: “Bukankah engkau ingin agar mereka memberikan bakti yang sama kepadamu? Maka dapat dikatakan, sekiranya mereka mengetahui bahwasanya ayahnya memberi mereka sesuai dengan pembagian Allah Swt, niscaya dalam hati mereka tidak ada rasa dengki terhadap ayah mereka. Sehingga, yang benar adalah bahwa keadilan tersebut sesuai dengan kadar bagian waris mereka.

Syuraij berkata kepada seorang laki-laki, ”Bagilah hartamu berdasarkan ketetapan Allah Swt.” Atho’ juga berkata demikian: ”Mereka tidak membagi harta-hartanya kecuali dengan ketetapan Allah Swt.”²¹

Yang dijadikan ukuran dalam keadilan adalah hukum. Dalam hal ini adalah syari’at Islam. Jadi lebih tepat apabila pemberian hibah tersebut dibagi berdasarkan ketetapan Allah Swt. Yaitu dengan pertimbangan tanggung jawab dan kebutuhan yang dipegang lebih besar. Karena tidak ada yang lebih adil selain-Nya, sedangkan Allah Swt telah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: ”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. An-Nisa’, ayat;11)²²

Ayat di atas kemudian dijadikan oleh sebagian para ulama’ diantaranya Ibnu Qudamah sebagai dalil mengenai kebolehan melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak, dan tidak adanya kewajiban menyamakan pemberian baik harta waris maupun hibah. Dikarenakan adanya tanggung jawab dan tingkat kebutuhan yang berbeda antara anak laki-laki dengan perempuan.

²¹ Ibnu Qudamah, *Loc. Cit*

²² TIM DISBANTALAD, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2005, hlm. 143

Kemudian dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai adil itu tampak jelas bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu yang harus dimaknai dengan kesamaan, akan tetapi berdasarkan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial. Walaupun seseorang diberikan sesuatu yang sama, maka belum tentu pihak lain merasakan suatu keadilan bisa jadi malah merasa dirugikan.

Selain itu penulis dalam menganalisa pendapat Ibnu Qudamah juga memperhatikan kata "*tashoddaqo*" yang berasal dari masdhar "*shodaqoh*" dan memiliki pengertian: pemberian kepemilikan dikarenakan sangat membutuhkan dan hanya mengharap pahala. Secara logika dan etika, mana mungkin dalam hal ini Nabi Saw memerintahkan untuk meminta kembali pemberian Basyir kepada Nu'man di mana ia (Nu'man) sangat membutuhkan, selain itu penarikan kembali terhadap shodaqoh tidak diperbolehkan.

Penulis sangat tidak setuju dengan ulama' yang menyatakan pemberian harus sama dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, karena hadits tersebut *mursal*.²³ Selain itu, menurut analisis penulis hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dengan alasan ditinjau dari segi matan:

1. Bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam al-Qur'an, di mana Allah Swt telah menetapkan bagian yang berbeda antara anak laki-laki dengan perempuan.

Ditinjau dari segi rawi dan sanad:

²³ Hadits "*mursal*" ialah: 'Hadits yang gugur sanadnya setelah Tabi'in. (nama sanad terakhir tidak disebutkan). Padahal sahabat adalah orang yang pertama menerima hadits dari Rasullallah Saw.'" Termasuk juga hadits *mursal*, apabila hadits tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat yang ia sendiri tidak menerima langsung dari Nabi Saw. Dikarenakan masih kecil atau saat hadits itu diwurudkan tidak dalam satu majlis bersama Nabi Saw, namun ia katakan telah menerima hadits itu dari Nabi Saw. Kutipan (Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet. 4, 2003, hlm. 156-157)

1. Perawi pertama yaitu Ibnu Abbas r.a dalam periwayatan tidak *sama*'(tidak secara langsung mendengar), mengalami, bersama Nabi Saw dalam satu majlis saat hadits tersebut diwurudkan, dan menunjukan sanadnya tidak bersambung. Berdasarkan konteks yang ada pada saat hadits tersebut diwurudkan adalah berkaitan dengan masalah yang terjadi di dalam keluarga Basyir, yang kemudian basyir memitna pendapat kepada Nabi Saw.

Padahal ketika membandingkan dan melihat asbabul wurud hadits Nu'man tersebut adalah berkaitan dengan munculnya permasalahan mengenai pemberian Basyir yang dilebihkan terhadap Nu'man, yang kemudian Nabi Saw menjawab permasalahan tersebut seraya berkata: "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anakmu". Maka dari itu, hadits bin Basyir lebih shohih dikarenakan dari segi perawi, Nu'man mendengar, langsung periwayatan hadits tersebut Nabi Saw, dan mengalami bersama Nabi Saw dalam satu majlis saat hadits tersebut diwurudkan. Kemudian dari segi matan juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan akal dan kenyataan sejarah.

Allah Swt telah menetapkan bagian seorang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Yang kemudian hal tersebut menunjukan tidak adanya kewajiban untuk menyamakan di dalam pemberian hibah, dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu seperti kebutuhan. Maka dari itu, hadits tersebut sangat tidak relevan dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil atas kewajiban menyamakan pemberian hibah, terlebih tidak sesuai dengan tujuan syari'at yaitu kemaslahatan umat. Hadits yang memerintahkan untuk menyamakan sangat tidak relevan

dengan realita di masyarakat yang mengalami perubahan masa, tempat keadaan dan kebiasaan.

Sedangkan mengenai hadits Nu'man menurut Ibnu Qudamah lebih shahih dan hadits tersebut telah disepakati oleh para ulama', selain itu perintah untuk menarik kembali dan menyamakan adalah tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam hal ini, yaitu hibah yang dilandasi unsur kebutuhan atau dengan kata lain hibah shodaqoh, dikarenakan pemberian sodaqoh tidak diperbolehkan ditarik kembali.

Selain itu dalam menetapkan hukum terhadap kebolehan orang tua untuk melebihkan pemberian diantara sebagian anak, adalah berdasarkan *qoul sahabat*, yaitu pemberian hibah yang dilebihkan Abu Bakar r.a terhadap A'isyah menjelang kematian. Hal ini juga dilakukan oleh sahabat Umar r.a kepada anaknya yaitu 'Ashim dan Abdullah Ibnu Umar pernah melakukan hal demikian.²⁴

Dan sebenarnya letak kemakruhan dalam hal ini adalah ketika mereka memiliki kebutuhan yang sama atau tidak adanya kebutuhan yang menuntut untuk melebihkannya. Dan hal inilah yang dijadikan sebagai pemahaman terhadap melebihkannya para sahabat sebagaimana yang telah berlaku.

Padahal saat Nabi Saw memerintahkan kepada basyir beliau tidak mentafshil (memperinci pertanyaannya) apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Sehingga lafadz tersebut menjadi bersifat umum.

²⁴ As-Syirbini, *Op. Cit*, hlm. 401

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak.

Ibnu Qudamah sebagaimana generasi ulama' Hanabillah dalam beristinbath hukum lebih cenderung menggunakan metode qiyas yang dalam hal ini *qiyas khafi* atau disebut dengan *istihsan* di mana mengalihkan dalil kepada dalil lain untuk menghasilkan hukum yang lebih baik.²⁵ Atau suatu cara untuk meninggalkan qiyas yang nyata (*jali*) untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (*khafi*) atau berpindah dari hukum *kulli* kepada hukum *istisna* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membolehkannya.²⁶

Istihsan macam ini oleh ulama' Hanafiah disebut dengan istihsan *dharurat* karena penyimpangan tersebut dilakukan dengan maksud menghadapi keadaan yang mendesak atau untuk menghindari kesulitan.²⁷

Kemudian *istihsan* berdasarkan dalil yang mendasarinya terbagi menjadi 4 (empat) macam:

1. *Istihsan* dengan *nash*
2. *Istihsan* dengan *ijma'*
3. *Istihsan* dengan *dharurat*
4. *Istihsan* dengan *urf* (kebiasaan)

Menurut analisis penulis, Ibnu Qudamah dalam beristinbath mengenai pembagian hibah terhadap anak dibagi berdasarkan *faroid* (ketetapan Allah) yaitu

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Op. Cit*, hlm. 50

²⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, Cet. I, hlm. 122

²⁷ *Ibid.* hlm. 106

anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Adalah menggunakan metode *istihsan* yang didasarkan atas nash Al-Qur'an. Selain itu dasar dia menggunakan qoul sahabat adalah merupakan bentuk kedua dari macam-macam *istihsan* di atas yaitu dengan ijma' baik sharih maupun sukuti.

Pendapat dia mengenai kebolehan melebihkan dikarenakan adanya unsur penyimpangan dalam pentasharufan harta, cacat buta yang memerlukan perawatan dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit juga merupakan suatu cara beristinbath yang diambil dengan menggunakan *istihsan* dengan kedharuratan, dan yang terakhir mengenai unsur kebutuhan lebih besar menjadi *illat* dalam kebolehan melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak adalah sangat terkait dengan *urf*, dimana dalam suatu daerah tertentu terkadang perempuan memegang peranan penting dalam keluarga dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensinya adalah perempuan bisa mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki. Sebagaimana kaidah fiqh disebutkan:

²⁸ العادة محكمة

Artinya: “Kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum.”

Dalam hal pemberian hibah dibagi berdasarkan waris adalah merupakan *qiyas jali* (qiyas yang nyata), karena hal tersebut merupakan “pemberian yang disegerakan”.²⁹ Dan pada dasarnya merupakan warisan yang akan dibagi setelah meninggal, tetapi pemberian tersebut dibagi ketika pemberi masih hidup dengan tujuan mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari diantara anak-anaknya dan masih disaksikan oleh si pemberi. Maka ”sebaiknya” dibagi

²⁸ Mustafa Ahmad Zarqo, *Al-Madkhol*, Juz. 2, Beirut: Lubnan, tt, hlm. 999

²⁹ Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 267

berdasarkan *faroid* (ketetapan Allah) yaitu dua banding satu, laki-laki memperoleh dua bagian dari perempuan.³⁰

Kata “Sebaiknya” disinilah juga meupakan salah satu yang menunjukkan penggunaan metode *istihsan*, selain memahami cara berfikir yang diambil oleh Ibnu Qudamah dalam berijtihad. Karena hal tersebut terlihat ketika mereka telah berumah tangga, dimana maskawin, nafkah keluarga dan nafkah anak semua ditanggung oleh pihak laki-laki. Yang kemudian apabila dihubungkan dengan makna melebihkan pemberian kepada laki-laki. Sebagai *illat*-nya adalah tambahnya kebutuhan seseorang. Pemberian hibah tersebut dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan tanpa melihat status anak sebagai laki-laki atau perempuan adalah berdasarkan *qiyas khafi* dimana ada unsur penyimpangan atau meninggalkan kaidah umum menuju *istisna'* atau pengecualian demi terciptanya kemaslahatan umat, dan pemberian tidak mengharuskan kesamaan dari segi manapun.

Menurut penulis yang terpenting dalam hal ini tidak adanya suatu kecurangan yang mengakibatkan perbuatan dzalim. Apalagi harta tersebut adalah pada dasarnya milik orang tua jadi hak mutlaq untuk memberi tetap berada di tangan orang tua. Kemungkinan terjadi kecurangan justru bukan terletak pada orang tua, akan tetapi kepada anak. Sebab terkadang ada anak yang berbuat curang dengan mengambil hak kepemilikan yang sebenarnya bukan haknya.

Penulis cenderung memilih pendapat Ibnu Qudamah yang memperbolehkan untuk melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak. Hal

³⁰ *Ibid.*,

ini didasarkan pada alasan-alasan berikut sebagai bentuk kelenturan agama Islam dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat menurut keadaan:

Allah Swt telah berfirman;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya; “Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (Al-Baqoroh, ayat;185).³¹

Bahwasanya ayat diatas cukup jelas bahwa Allah swt tidak mempersulit umatnya dalam menjalankan suatu agama, dan Islam adalah agama yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Jadi ketika hadits tentang perintah kewajiban menyamakan tersebut tidak dapat diaplikasikan dengan realita yang ada di masyarakat, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan Syari’at yaitu kemaslahatan manusia, kenapa harus diamalkan.

Dalam suatu kaidah kaidah fiqih disebutkan:

المشقة تجلب التيسر³²

Artinya; “Kesulitan menarik kepada kemudahan”

Kaidah ini menunjukan bahwa ketika ditemukan suatu persoalan yang sulit untuk dipecahkan, Islam memberikan berbagai terobosan-terobosan baru agar dapat terwujud tujuan syari’at itu sendiri. Dan selain itu Islam juga memberikan keluasan, khususnya dalam memahami dan mengamalkan Syari’at. Sebagaimana kaidah fiqih disebutkan:

الأمر إذا ضاق إتسع³³

Artinya: “Apabila ada urusan itu sempit ia menjadi lapang”

³¹ TIM DISBANTALAD, *Op. Cit*, hlm. 49

³² Mustafa Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 991

³³ *Ibid*, hlm. 994

Bahkan Islam pun memperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at apabila dalam keadaan yang dapat mengancam jiwa. Atau hanya sekedar kebutuhan karena terkadang kebutuhan juga menempati kedudukan dharurat.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة³⁴

Artinya: “*Hajat (kebutuhan) terkadang menempati kedudukan dharurat yang bersifat umum ataupun khusus*”

Dan sesungguhnya kemudharatan yang dapat merugikan kepada diri sendiri maupun orang lain itu harus dihilangkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh;

الضرر يزال³⁵

Artinya: “*Mudharat itu harus dihilangkan*”

Yang terpenting dalam hal ini, yaitu diperbolehkannya melebihi pemberian diantara sebagian anak, tidak ada yang saling dirugikan. Sebagaimana kaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار³⁶

Artinya; “*Tidak diperbolehkan melakukan mudharat (yang dapat merugikan) kepada diri sendiri dan orang lain*”

Sangat jelas bahwa nash hadits Nabawi yang dijadikan sebagai kaidah fiqh oleh fuqoha' tersebut melarang seseorang untuk melakukan hal-hal yang mengandung kemadhoratan, berdampak negatif dan merugikan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang merupakan suatu kezaliman.

³⁴ Ibid, hlm. 997

³⁵ Ibid, hlm. 982

³⁶ Ibid, hlm. 977

Mungkin ketika mengaplikasikan hadits tentang persamaan pemberian dengan membandingkan dan melihat fenomena di masyarakat yang sangat beragam. Contoh riil adalah pemberian kepada anak yang masih kecil dengan anak yang sudah dewasa, secara logika pasti berbeda dikarenakan kebutuhan yang berbeda pula. Apakah dalam hal ini akan diberikan sama dengan berdasarkan pemahaman atas dasar hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a yang memerintahkan untuk berbuat sama diantara anak-anaknya dalam pemberian? Bukankah ini yang dimaksud dengan ketidakadilan atau sebuah kezaliman, padahal Islam tidak menghendaki yang demikian.

Agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kemaslahatan umat. Contoh lain yaitu biaya yang dikeluarkan untuk salah seorang anak yang menderita sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya. Apakah wajar bagi saudara untuk meminta bagian seperti halnya biaya yang dikeluarkan sebagai pemberian hibah yang dikeluarkan guna pengobatan? Secara logika sangat tidak etis, jika hal tersebut dilakukan terlebih disaat saudaranya sedang terkena musibah. Kenapa penulis memberikan contoh sebagai berikut dikarenakan semua itu tidak terlepas dari makna hibah itu sendiri yaitu pemberian kepemilikan ketika masih hidup tanpa adanya *iwadh* (pengganti). Dan soal bagaimana cara pelaksanaan, kadar (ukuran besar kecilnya) hibah tersebut adalah juga sangat tergantung pada *urf* (kebiasan) masing-masing daerah dan kemampuan si Pemberi yang menganggap bahwa hal tersebut juga dinamakan dengan hibah.